

Menganalisis Perbandingan Administrasi Publik di Negara Jerman dan Perancis

Ama Ilhamri Bin Dahlan¹, Cahya Eka Anjani², Fithria Sari Andalas³, Nazwa Aisyarah Rafi⁴, Salma Dyahning Anggraeni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: amailham666@gmail.com¹, cahyaekaanjani123@gmail.com², fithriasaria@gmail.com³, nazwaaisyarah@gmail.com⁴, salmadyahning16@gmail.com⁵

Article History:

Received: 28 Juni 2024

Revised: 08 Juli 2024

Accepted: 10 Juli 2024

Keywords: Compare, Administration, German, French, System.

***Abstract:** This article compares German and French state administration, highlighting differences in state form, political systems, as well as resource, historical, moral and economic factors. Germany itself, with a strong federal and decentralized system, is different from France which is a unitary country with dominant centralization. German politics is also based on a multiparty system that encourages consensus, while France has a semi-presidential system with significant executive powers. HR in Germany emphasizes meritocracy, while France is more bureaucratic. In terms of natural resources, Germany focuses on energy efficiency and green technology due to limited resources, while France has advantages with nuclear energy, a strong agricultural sector, and mineral reserves such as uranium and iron ore. Historically, Germany developed decentralization after World War II, while France has a tradition of centralization. From a moral perspective, Germany emphasizes collectivism, while France emphasizes egalitarianism. The German economy adopts a social market model, while France has a mixed economy with higher government intervention. This analysis shows how these factors influence state administration in both countries and provides important insights for governance studies.*

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara. Sistem dan praktik administrasi publik yang efektif dan efisien menjadi kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Kajian perbandingan administrasi publik dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu administrasi publik. Kajian perbandingan administrasi publik diperlukan untuk kebutuhan praktis yang dinamis dan tren global yang memerlukan pembangunan. Mengacu pada (Riggs,1991) pandangan pengalaman Amerika yang sungguh luar biasa dalam pengembangan ilmu administrasi publik, mengarahkan pengembangan penelitian komparatif administrasi publik pada studi negara “negara lain” sebagai objek dari belajar. Riggs menyimpulkan bahwa penelitian manajemen

komparatif menghasilkan pengetahuan manajemen yang baik dan mengembangkan prinsip-prinsip manajemen yang secara fundamental baik.

Dalam konteks globalisasi yang semakin dinamis, perbandingan sistem administrasi publik antar negara menjadi kian penting untuk memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing, serta untuk mengadopsi praktik terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi publik di negara sendiri. Jerman dan Perancis, dua negara maju di Eropa, memiliki sistem administrasi publik yang telah berkembang pesat dan diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Mempelajari dan membandingkan sistem administrasi publik di kedua negara ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan administrasi publik di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Perancis secara resmi Republik Perancis (Perancis: République française) adalah negara yang wilayahnya terdiri dari metropolitan Perancis di Eropa Barat dan beberapa wilayah dan wilayah luar negeri. Wilayah metropolitan Perancis membentang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudra Atlantik. Jerman dan Perancis mempunyai banyak perbedaan dari faktor bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang berbeda, sistem pemerintahan politik, perbedaan dari faktor sejarah, perbedaan dari faktor sumberdaya dan moral, dan perbedaan dari faktor ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi literatur, di mana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dihasilkan berupa kata-kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang mengambil objek kajian dari pustaka atau literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian-kajian yang serupa atau berhubungan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui membaca dokumen, majalah, jurnal, artikel, buku-buku kajian, serta perangkat peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Bentuk Negara dan Pemerintahan Jerman dan Perancis

Jerman adalah negara federal di Eropa Tengah yang memiliki sistem politik yang unik. Jerman merupakan negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian (Länder) yang memiliki otonomi dalam sejumlah kebijakan tertentu. Negara bagian tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan berbagi kekuasaan dengan pemerintah federal di Berlin. Bentuk negara Jerman adalah republik federal, artinya kekuasaan terbagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintah federal dipimpin oleh seorang kanselir yang dipilih oleh Bundestag (parlemen federal) dan diangkat oleh Presiden Jerman. Presiden Jerman sendiri adalah kepala negara yang memiliki peran seremonial dan simbolis.

Pemerintah federal Jerman terdiri dari dua kamar parlemen, yaitu Bundestag (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Bundesrat (Dewan Perwakilan Negara Bagian). Bundestag merupakan badan legislatif utama yang dipilih oleh rakyat Jerman dalam pemilihan umum setiap empat tahun sekali. Sedangkan Bundesrat terdiri dari perwakilan dari pemerintah-pemerintah negara bagian dan memiliki peran dalam proses legislasi di tingkat federal. Sistem politik Jerman juga dikenal dengan sistem multipartai yang kuat, di mana terdapat beberapa partai politik yang berperan dalam politik Jerman. Partai-partai utama di Jerman antara lain Partai Demokrat Sosial (SPD), Uni Demokrat Kristen (CDU), Partai Demokrat Bebas (FDP), dan Partai Hijau.

Selain itu, Jerman juga memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta sistem birokrasi yang efisien. Pemerintah Jerman bertanggung jawab atas berbagai kebijakan publik, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan. Secara keseluruhan, bentuk negara dan pemerintahan Jerman menunjukkan komitmen mereka terhadap demokrasi, federalisme, dan kebebasan berpendapat. Sistem politik Jerman terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi, tetapi prinsip-prinsip dasar demokrasi tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut.

Struktur negara dan struktur pemerintahan negara Jerman mencerminkan karakter federalisme yang kuat dan sistem politik multipartai yang kompleks. Jerman adalah negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian (Länder) yang memiliki otonomi dalam sejumlah kebijakan tertentu. Struktur pemerintahan negara Jerman terdiri dari pemerintah federal di Berlin dan pemerintah-pemerintah negara bagian. Pemerintah federal Jerman dipimpin oleh seorang kanselir yang dipilih oleh Bundestag (parlemen federal) dan diangkat oleh Presiden Jerman. Kanselir adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintah federal. Presiden Jerman, sebagai kepala negara, memiliki peran seremonial dan simbolis, sementara kekuasaan eksekutif sebagian besar berada di tangan kanselir dan kabinetnya. Bundestag merupakan badan legislatif utama di tingkat federal yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih langsung oleh rakyat Jerman dalam pemilihan umum setiap empat tahun sekali. Bundestag memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan penetapan kebijakan nasional. Di samping itu, terdapat Bundesrat (Dewan Perwakilan Negara Bagian) yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah-pemerintah negara bagian. Bundesrat memiliki peran dalam proses legislasi di tingkat federal dengan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap keputusan-keputusan penting.

Selain pemerintah federal, setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang ministerpräsident (gubernur). Pemerintah negara bagian memiliki kewenangan dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kebudayaan, dan kebijakan dalam lingkup regional. Pemerintah negara bagian juga memiliki perwakilan di Bundesrat yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan penting di tingkat federal. Sistem politik Jerman juga dikenal dengan sistem multipartai yang kuat. Partai-partai utama di Jerman antara lain Partai Demokrat Sosial (SPD), Uni Demokrat Kristen (CDU), Partai Demokrat Bebas (FDP), dan Partai Hijau. Sistem ini mencerminkan pluralisme politik yang kuat di Jerman, di mana berbagai partai memiliki peran penting dalam proses politik dan pembuatan keputusan. Tidak hanya itu, Jerman juga memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta sistem birokrasi yang efisien. Pemerintah Jerman bertanggung jawab atas berbagai kebijakan publik, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan.

Secara keseluruhan, struktur negara dan pemerintahan negara Jerman menunjukkan komitmen mereka terhadap demokrasi, federalisme, dan kebebasan berpendapat. Sistem politik Jerman terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi, tetapi prinsip-prinsip dasar demokrasi tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut.

Berbeda dengan Jerman yang merupakan negara federal, Prancis ialah negara republik yang terletak di Eropa Barat dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi Republik Kelima yang diadopsi pada tahun 1958. Struktur negara dan

pemerintahan Prancis mencerminkan tradisi sentralisasi yang kuat, di mana kekuasaan politik terpusat di pemerintah pusat di Paris. Namun, Prancis juga memiliki sejumlah wilayah otonom seperti Korsika, Guadeloupe, Martinique, dan Reunion. Bentuk negara Prancis adalah negara unitaris, yang berarti bahwa kekuasaan politik dan administratif terpusat di pemerintah pusat di Paris. Prancis tidak memiliki sistem federal seperti Jerman, tetapi memiliki sejumlah wilayah otonom yang diberikan kewenangan tertentu dalam bidang-bidang seperti budaya, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Bentuk pemerintahan negara Prancis adalah republik semi-presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Perdana Menteri, yang dipilih oleh presiden, bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari dan kebijakan dalam negeri. Kemudian Struktur negara Prancis terdiri dari tiga tingkat administratif utama: pusat, wilayah, dan komune (kota atau desa). Pusat diwakili oleh pemerintah pusat di Paris yang dipimpin oleh presiden dan perdana menteri. Wilayah dibagi menjadi 18 region administratif dan 101 departemen yang memiliki kewenangan dalam bidang-bidang tertentu seperti infrastruktur, transportasi, dan pengembangan ekonomi regional. Komune adalah unit administratif terkecil di Prancis yang memiliki otonomi dalam pengelolaan urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan.

Struktur pemerintahan Prancis terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah regional, dan pemerintah lokal. Pemerintah pusat dipimpin oleh presiden dan perdana menteri, sedangkan pemerintah regional dipimpin oleh presiden dewan regional dan pemerintah lokal dipimpin oleh walikota atau kepala desa. Pemerintah regional memiliki kewenangan dalam pengelolaan urusan regional dan pembangunan ekonomi, sementara pemerintah lokal bertanggung jawab atas urusan lokal dan pelayanan publik di tingkat komune. Sistem politik Prancis didasarkan pada sistem multipartai dengan partai-partai utama seperti La République En Marche (LREM), Partai Sosialis (PS), Les Républicains (LR), dan Front National (FN). Sistem ini mencerminkan pluralisme politik yang kuat di Prancis, di mana berbagai partai memiliki peran penting dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

Secara keseluruhan, struktur negara dan pemerintahan Prancis mencerminkan tradisi sentralisasi yang kuat namun juga memberikan ruang bagi otonomi wilayah dan komune. Sistem politik Prancis terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi, tetapi prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut

2. Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan di Jerman dan Prancis

Sistem politik Jerman adalah sebuah demokrasi liberal yang kuat dan matang. Negara ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta kebebasan berpendapat dan berserikat. Jerman memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang independen dan kuat, seperti Mahkamah Konstitusi Federal yang bertugas menjaga konstitusi negara dan memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap seimbang.

Pemerintahan Jerman didasarkan pada prinsip republik parlementer federal di mana kekuasaan eksekutif terletak pada Kanselier yang dipilih oleh Bundestag, parlemen federal. Kanselier bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan memimpin kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipilihnya. Bundestag memiliki kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Bundesrat, lembaga

perwakilan negara bagian, juga memiliki peran dalam proses legislasi. Bundestag dan Bundesrat merupakan dua lembaga utama dalam sistem politik Jerman yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan keputusan politik dan legislasi. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai kedua lembaga tersebut:

a. Bundestag:

Bundestag adalah parlemen federal Jerman yang merupakan lembaga legislatif tertinggi di negara tersebut. Bundestag memiliki peran utama dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan merepresentasikan kepentingan rakyat. Anggota Bundestag dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap empat tahun sekali. Bundestag terdiri dari 598 anggota (dapat bervariasi tergantung pada hasil pemilihan) yang disebut sebagai "Anggota Bundestag" atau "Bundestagsabgeordnete". Anggota Bundestag mewakili partai politik yang berbeda dan juga distrik pemilihan di seluruh Jerman. Bundestag memiliki banyak kewenangan, termasuk pembuatan undang-undang, penganggaran, pengawasan pemerintah, dan pemilihan Kanselir Federal. Salah satu peran penting Bundestag adalah memilih Kanselir Federal, yang merupakan kepala pemerintahan Jerman. Bundestag juga memiliki komite-komite yang bertugas untuk membahas isu-isu spesifik dan mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, Bundestag juga memiliki peran dalam hubungan luar negeri, terutama dalam hal persetujuan perjanjian internasional.

b. Bundesrat:

Bundesrat adalah lembaga legislatif lainnya di Jerman yang mewakili kepentingan negara bagian (Länder) di tingkat federal. Bundesrat memiliki peran dalam memberikan suara atau persetujuan terhadap undang-undang federal dan kebijakan-kebijakan penting lainnya. Bundesrat terdiri dari perwakilan dari pemerintah negara bagian Jerman, bukan dipilih secara langsung oleh rakyat. Jumlah perwakilan dari setiap negara bagian bervariasi tergantung pada ukuran populasi negara bagian tersebut. Misalnya, negara bagian dengan populasi yang lebih besar seperti Bayern dan Nordrhein-Westfalen memiliki lebih banyak perwakilan dibandingkan dengan negara bagian yang lebih kecil. Bundesrat memiliki peran yang kuat dalam proses legislasi karena setiap undang-undang federal harus disetujui oleh Bundesrat sebelum dapat menjadi hukum. Bundesrat juga memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan mengubah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Bundestag. Oleh karena itu, Bundesrat merupakan lembaga yang sangat penting dalam memastikan bahwa kepentingan negara bagian diwakili dalam proses pembuatan keputusan politik di tingkat federal.

Kedua lembaga ini, Bundestag dan Bundesrat, bekerja sama dalam proses pembuatan keputusan politik untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat Jerman dan negara bagiannya diwakili dengan baik. Dengan demikian, kedua lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Jerman. Sistem politik Jerman memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut:

a. Ekonomi:

Sistem politik Jerman sangat mempengaruhi ekonomi negara ini. Jerman dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan memiliki sistem

ekonomi campuran yang kuat. Pemerintah Jerman memiliki peran yang signifikan dalam mengatur ekonomi, namun sektor swasta juga memiliki peran yang besar. Jerman dikenal dengan model ekonomi sosial pasar, di mana pemerintah berperan dalam mengatur pasar untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan sosial. Pemerintah Jerman juga aktif dalam mendorong inovasi dan riset serta memberikan dukungan kepada industri-industri kunci seperti otomotif, teknologi, dan manufaktur. Selain itu, sistem pendidikan Jerman yang berkualitas juga berkontribusi pada keberhasilan ekonomi negara ini dengan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan terdidik.

b. Keamanan:

Dalam hal keamanan, Jerman memiliki sistem keamanan yang kuat dan terkoordinasi. Jerman merupakan anggota NATO dan berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama dengan sekutu-sekutunya. Selain itu, Jerman juga memiliki kekuatan militer yang signifikan dan berperan dalam operasi perdamaian internasional. Sistem keamanan dalam negeri Jerman juga diperkuat oleh kepolisian yang profesional dan efisien serta lembaga intelijen yang bekerja untuk melindungi negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Sistem hukum yang kuat juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

c. Pendidikan:

Sistem politik Jerman juga memiliki dampak besar terhadap pendidikan. Jerman memiliki sistem pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh negara bagian. Pendidikan di Jerman gratis dan wajib selama sembilan tahun, sehingga semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dasar. Selain itu, Jerman juga dikenal dengan pendidikan teknis dan vokasional yang sangat dihargai. Sistem ini memberikan kesempatan bagi para siswa untuk memperoleh keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri. Pendidikan tinggi dan penelitian juga didorong secara aktif oleh pemerintah Jerman untuk mendukung inovasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

d. Kesehatan:

Dalam hal kesehatan, Jerman memiliki sistem kesehatan universal yang memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh warga negara. Sistem kesehatan Jerman didanai melalui asuransi kesehatan wajib yang dikelola oleh badan-badan asuransi kesehatan swasta dan publik. Warga Jerman dapat mengakses layanan kesehatan primer, spesialis, serta rawat inap tanpa biaya tambahan. Sistem kesehatan Jerman juga didukung oleh infrastruktur medis yang modern dan tenaga medis yang terlatih dengan baik. Pemerintah juga aktif dalam mendorong inovasi di sektor kesehatan serta memastikan akses layanan kesehatan yang merata di seluruh negeri.

Sedangkan Prancis merupakan sebuah republik demokratis dengan sistem politik yang terdiri dari tiga cabang pemerintahan yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran dan wewenangnya sendiri untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang masing-masing cabang pemerintahan di Prancis:

a. Cabang Eksekutif:

Cabang eksekutif di Prancis dipimpin oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan

nasional. Presiden juga bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden tidak bersifat absolut, karena konstitusi Prancis memberikan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kekuasaan eksekutif. Selain presiden, cabang eksekutif juga terdiri dari pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen dan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pemerintah Prancis bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan undang-undang, dan administrasi negara.

b. Cabang Legislatif:

Cabang legislatif di Prancis terdiri dari dua lembaga: Majelis Nasional (*Assemblée Nationale*) dan Senat (*Sénat*). Majelis Nasional adalah lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Majelis Nasional memiliki peran penting dalam membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Sementara itu, Senat adalah lembaga yang terdiri dari perwakilan-wakil perdaerah yang dipilih oleh para anggota majelis daerah setiap tiga tahun sekali. Senat memiliki fungsi pengawasan terhadap undang-undang yang diajukan oleh Majelis Nasional, serta memberikan perspektif regional dalam proses legislasi.

c. Cabang Yudikatif:

Cabang yudikatif di Prancis bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan. Sistem peradilan di Prancis terdiri dari berbagai tingkatan pengadilan mulai dari pengadilan distrik hingga Mahkamah Agung (*Cour de Cassation*). Hakim-hakim di Prancis bersifat independen dan tidak tunduk pada tekanan politik atau intervensi dari cabang eksekutif atau legislatif. Selain itu, Prancis juga memiliki Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) yang bertugas memastikan bahwa undang-undang yang disahkan sesuai dengan konstitusi. Dewan Konstitusi ini terdiri dari sembilan anggota yang ditunjuk oleh presiden, ketua Senat, dan ketua Majelis Nasional.

Dengan adanya tiga cabang pemerintahan yang independen tersebut, Prancis berusaha menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan sistem politik yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Sebagai sebuah negara demokratis, Prancis memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang transparan. Namun, seperti negara-negara lainnya, Prancis juga tidak luput dari kritik terkait aspek otoriter dalam sistem politiknya. Beberapa aspek otoriter dalam sistem politik Prancis dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

a. Sentralisasi Kekuasaan:

Prancis dikenal dengan tradisi sentralisasi kekuasaan yang kuat di tangan pemerintah pusat, terutama di Paris. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan wilayah mereka. Sentralisasi kekuasaan ini juga dapat membatasi otonomi daerah dan mempersempit ruang gerak bagi partisipasi politik yang inklusif.

b. Pengawasan Media:

Meskipun Prancis memiliki kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi, namun terdapat kritik terhadap pengawasan media oleh pemerintah. Beberapa pihak menilai bahwa pemerintah Prancis seringkali menggunakan kekuasaan politiknya

untuk mengendalikan informasi yang disampaikan oleh media, terutama dalam konteks isu-isu sensitif seperti kebijakan imigrasi, keamanan nasional, dan hak asasi manusia.

c. Kriminalisasi Protes dan Aktivisme:

Prancis sering dikritik karena pendekatan keras terhadap protes dan aktivisme politik. Penindakan hukum terhadap demonstran, pembatasan kebebasan berkumpul, serta penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menanggapi protes sering menuai kontroversi dan dianggap sebagai tindakan otoriter yang merugikan hak-hak warga negara. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Prancis tetap merupakan negara demokratis yang memiliki mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara cabang pemerintahan yang independen. Kritik terhadap aspek otoriter dalam sistem politik Prancis seharusnya menjadi panggilan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik demi memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh.

Sistem politik Prancis merupakan salah satu sistem politik yang kompleks dan terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, seperti ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan, dan lainnya. Setiap aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Prancis. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem politik Prancis yang mencakup berbagai aspek kehidupan:

a. Ekonomi:

Prancis memiliki sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen-elemen kapitalisme dan sosialisme. Pemerintah Prancis memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur sektor-sektor ekonomi strategis, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Selain itu, Prancis juga memiliki sistem jaminan sosial yang kuat, termasuk sistem kesehatan dan pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah. Hal ini mencerminkan komitmen Prancis terhadap prinsip kesetaraan sosial dan perlindungan terhadap warga negaranya.

b. Keamanan:

Prancis merupakan salah satu negara dengan kebijakan keamanan yang ketat, terutama setelah serangkaian serangan teror yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Prancis telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan dalam negeri, termasuk peningkatan pengawasan terhadap aktivitas teroris, peningkatan anggaran untuk keamanan, serta kerjasama internasional dalam menangani ancaman keamanan global. Meskipun demikian, upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan juga menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.

c. Pendidikan:

Pendidikan di Prancis diatur oleh pemerintah pusat dan dikelola secara terpusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan di Prancis mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang didasarkan pada prinsip kesetaraan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, Prancis juga memiliki tradisi pendidikan yang kuat dalam bidang seni, sastra, dan humaniora. Namun, sistem pendidikan Prancis juga dihadapkan pada tantangan terkait kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta integrasi siswa imigran.

d. Kesehatan:

Sistem kesehatan di Prancis dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia

dengan cakupan universal bagi seluruh warga negara. Sistem kesehatan di Prancis didasarkan pada asuransi kesehatan universal (*Sécurité Sociale*) yang dikelola oleh pemerintah dan pembiayaannya didukung oleh kontribusi dari warga negara dan pemerintah. Pemerintah Prancis juga memberikan perhatian pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui program-program nasional.

e. Budaya:

Prancis memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, termasuk seni, sastra, musik, arsitektur, dan kuliner. Pemerintah Prancis memiliki kebijakan untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya ini melalui dukungan terhadap seniman dan lembaga budaya, serta melalui program-program pendidikan dan promosi budaya. Budaya Prancis juga menjadi daya tarik bagi pariwisata dan berkontribusi pada identitas nasional Prancis.

f. Lingkungan:

Prancis memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pemerintah Prancis telah mengadopsi kebijakan-kebijakan lingkungan yang ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan melindungi sumber daya alam. Prancis juga aktif dalam kerjasama internasional untuk menangani isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim.

Melalui berbagai aspek kehidupan yang disentuh oleh sistem politiknya, Prancis terus berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakatnya serta menjaga keberlangsungan negara dalam jangka panjang. Dengan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, Prancis terus bergerak maju dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern.

3. Perbedaan Dari Faktor Sejarah Negara Jerman Dan Prancis

Perbedaan antara Jerman dan Prancis dari segi faktor sejarahnya sangatlah kompleks dan beragam, karena kedua negara ini memiliki sejarah yang panjang dan beragam yang telah membentuk identitas dan karakteristik masing-masing. Sejarah Jerman memiliki akar yang dalam dan kaya, dimulai dari pembentukan Kekaisaran Romawi Suci pada abad pertengahan yang menjadi cikal bakal Kekaisaran Jerman. Pada abad pertengahan, wilayah Jerman diperintah oleh berbagai bangsawan dan kepala suku yang saling bersaing untuk kekuasaan dan pengaruh. Kekaisaran Romawi Suci, yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Jerman, berkembang dari Kerajaan Franka di bawah pimpinan Charlemagne pada abad ke-8. Charlemagne dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 800 M, dan ini menjadi awal dari keberadaan Kekaisaran Jerman. Pada tahun 962 Masehi, Kaisar Otto I dari Wangsa Ottonian berhasil mendirikan Kekaisaran Romawi Suci, yang kemudian menjadi cikal bakal Kekaisaran Jerman. Selama berabad-abad, Kekaisaran Romawi Suci berkembang dan mengalami perubahan dinasti yang signifikan. Pada awal abad ke-16, Kekaisaran diperintah oleh Wangsa Habsburg. Kekuasaan Wangsa Habsburg semakin kuat karena mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan mereka di Eropa Tengah dan Timur. Di bawah kepemimpinan Kaisar Maximilian I dan cucunya, Kaisar Charles V, kekuasaan Habsburg semakin meluas.

Pada saat yang sama, Gereja Katolik menghadapi berbagai tantangan. Praktik-praktik kontroversial seperti penjualan indulgensi, di mana umat dapat membayar uang untuk pengampunan dosa, menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan umat Kristen. Selain itu, beberapa pemikir dan teolog, termasuk Martin Luther, mulai mempertanyakan ajaran-ajaran Gereja Katolik yang mereka anggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Pada tahun

1517, Martin Luther menulis 95 tesis yang menyerang praktik penjualan indulgensi. Tesis ini kemudian disebarakan melalui cetakan dan menjadi awal dari gerakan reformasi agama yang mengguncang kekuasaan Gereja Katolik. Luther menekankan ajaran sola scriptura (Alkitab sebagai satu-satunya otoritas keagamaan) dan sola fide (keselamatan hanya melalui iman).

Tesis ini menimbulkan kontroversi dan menjadi awal dari gerakan reformasi agama yang bertujuan untuk membersihkan Gereja dari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Luther menekankan pentingnya iman pribadi dan Alkitab sebagai otoritas tunggal dalam kehidupan beragama. Gerakan reformasi ini mendapatkan dukungan luas di Jerman dan negara-negara lain di Eropa karena banyak orang yang merasa tidak puas dengan keadaan Gereja Katolik yang korup. Namun, reaksi dari Gereja Katolik sangat keras dan memicu konflik antara penganut Katolik dan Protestan. Pada tahun 1521, Kaisar Charles V, penguasa Kekaisaran Romawi Suci yang berasal dari Wangsa Habsburg, mengeluarkan Edict of Worms yang menyatakan Luther sebagai seorang heretik.

Konflik antara Katolik dan Protestan semakin memanas di Jerman, terutama setelah Perang Schmalkaldic pada tahun 1547 antara pihak Protestan dan Katolik. Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 1618 ketika Perang Tiga Puluh Tahun pecah di Jerman. Perang Tiga Puluh Tahun dimulai dengan Pemberontakan Bohemia pada tahun 1618, di mana bangsawan Protestan Bohemia memberontak terhadap Kaisar Katolik Romawi Suci, Ferdinand II. Pemberontakan ini menjadi pemicu bagi konflik yang melibatkan berbagai kekuatan Eropa, baik yang beragama Katolik maupun Protestan. Konflik ini kemudian meluas dan melibatkan berbagai negara dan kekuatan di Eropa, termasuk Prancis, Spanyol, Swedia, dan Denmark. Perang ini tidak hanya melibatkan pertempuran militer, tetapi juga konflik politik dan agama yang kompleks.

Selama Perang Tiga Puluh Tahun, wilayah Jerman mengalami kerusakan besar akibat pertempuran, kelaparan, dan epidemi penyakit. Jutaan orang tewas akibat perang dan dampaknya terhadap masyarakat sangat besar. Banyak kota dan desa hancur, ekonomi terpuruk, dan penduduk mengalami penderitaan yang luar biasa. Salah satu dampak penting dari Perang Tiga Puluh Tahun adalah munculnya konsep negara-negara modern berdasarkan prinsip kedaulatan nasional. Konflik ini membawa perubahan dalam tatanan politik Eropa dengan munculnya negara-negara baru yang lebih kuat dan terpusat. Prinsip kedaulatan nasional mulai muncul sebagai landasan bagi pembentukan negara-negara modern di Eropa.

Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 menjadi penutup dari Perang Tiga Puluh Tahun dan menandai berakhirnya konflik tersebut. Perjanjian ini menetapkan batas-batas wilayah antara berbagai negara di Eropa dan mengakui kedaulatan nasional sebagai prinsip utama dalam hubungan internasional. Perang Tiga Puluh Tahun menjadi titik balik dalam sejarah Jerman dan Eropa, yang membawa perubahan besar dalam politik, agama, dan masyarakat. Konflik ini memperlihatkan betapa destruktifnya perang dan mengajarkan pelajaran berharga tentang pentingnya perdamaian dan kerjasama antarnegara.

Pembentukan Kekaisaran Jerman Bersatu di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck pada tahun 1871 merupakan tonggak sejarah yang penting dalam pembentukan negara Jerman modern. Proses ini melibatkan serangkaian peristiwa politik dan militer yang mengarah pada penyatuan berbagai negara kecil di wilayah Jerman menjadi satu negara yang kuat dan bersatu di bawah kepemimpinan Prusia. Awal mula pembentukan Kekaisaran Jerman Bersatu dimulai pada tahun 1862 ketika Bismarck diangkat sebagai Perdana

Menteri Prusia oleh Raja Wilhelm I. Bismarck memiliki visi untuk menyatukan negara-negara Jerman di bawah kekuasaan Prusia dan memperkuat posisi Prusia sebagai kekuatan dominan di Eropa Tengah. Untuk mencapai tujuannya, Bismarck menggunakan kebijakan "Realpolitik" yang mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya.

Salah satu langkah penting dalam perjalanan menuju penyatuan Jerman adalah Perang Austria-Prusia pada tahun 1866. Prusia berhasil mengalahkan Austria dan memaksa Austria keluar dari Konfederasi Jerman, sehingga memperkuat posisi Prusia sebagai pemimpin de facto dari negara-negara Jerman. Setelah itu, Bismarck berhasil membentuk Konfederasi Jerman Utara yang dipimpin oleh Prusia. Pada tahun 1870, terjadi Perang Prancis-Prusia yang dimanfaatkan oleh Bismarck untuk memperkuat persatuan Jerman. Prusia berhasil mengalahkan Prancis dan mendirikan Kekaisaran Jerman Bersatu dengan Wilhelm I dari Prusia dinobatkan sebagai Kaisar Jerman pada 18 Januari 1871 di Versailles. Proklamasi ini menandai akhir dari pembentukan negara Jerman modern yang bersatu di bawah satu pemerintahan.

Pembentukan Kekaisaran Jerman Bersatu membawa konsekuensi besar bagi Eropa dan dunia internasional. Jerman menjadi kekuatan dominan di Eropa dengan kekuatan militer dan ekonomi yang besar. Era imperialisme Jerman dimulai dengan agresi ekspansi ke wilayah-wilayah lain di Eropa dan luar negeri. Hal ini menciptakan ketegangan politik dan militer di Eropa dan berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia I. Dengan demikian, pembentukan Kekaisaran Jerman Bersatu di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck pada tahun 1871 merupakan titik balik penting dalam sejarah Jerman dan Eropa. Keberhasilan Bismarck dalam menyatukan negara-negara Jerman membawa konsekuensi yang besar bagi politik dan kekuasaan di Eropa serta membuka babak baru dalam sejarah imperialisme Jerman. Setelah berhasil menyatukan negara-negara Jerman, Jerman menjadi kekuatan dominan di Eropa dengan kekuatan militer dan ekonomi yang besar. Hal ini memicu ambisi ekspansi Jerman ke wilayah-wilayah lain di Eropa dan luar negeri sebagai bagian dari upaya untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan militer mereka.

Salah satu langkah awal dalam imperialisme Jerman adalah pembentukan aliansi dengan negara-negara lain di Eropa, seperti Austria-Hongaria dan Italia, untuk memperkuat posisi Jerman di kancah politik Eropa. Aliansi ini dikenal sebagai "Triple Alliance" yang bertujuan untuk melawan kekuatan-kekuatan lain di Eropa, terutama Prancis dan Rusia. Selain itu, imperialisme Jerman juga terlihat dalam upaya ekspansi kolonial mereka di luar Eropa. Setelah terbentuknya Kekaisaran Jerman Bersatu, Jerman mulai mengambil bagian dalam perlombaan kolonial di Afrika, Asia, dan Pasifik. Mereka mendirikan jajahan-jajahan kolonial di wilayah-wilayah tersebut untuk mengamankan sumber daya alam, pasar baru, dan posisi strategis bagi kepentingan ekonomi dan militer mereka.

Imperialisme Jerman juga tercermin dalam kebijakan luar negeri mereka yang agresif dan ekspansionis. Mereka terlibat dalam konflik-konflik internasional, seperti Krisis Maroko dan peningkatan ketegangan dengan negara-negara lain di Eropa. Ambisi ekspansi Jerman ini menciptakan ketegangan politik dan militer di Eropa dan berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Pada tahun 1914, pecahnya Perang Dunia I dipicu oleh serangkaian kontribusi dari berbagai negara, termasuk Jerman. Jerman memiliki peran penting dalam memicu perang ini melalui kebijakan luar negeri agresif dan ambisinya untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya di Eropa. Sebelum pecahnya perang, Jerman telah melakukan serangkaian langkah provokatif, termasuk mendukung Austria-Hongaria dalam krisis Sarajevo yang menjadi pemicu perang.

Selama Perang Dunia I, Jerman terlibat dalam pertempuran sengit di Eropa dan mengalami kerugian besar baik dari segi manusia maupun ekonomi. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I pada tahun 1918, Kekaisaran Jerman runtuh dan Pada tahun 1919 Republik Weimar didirikan sebagai negara demokratis di Jerman setelah runtuhnya Kekaisaran Jerman. Republik Weimar merupakan periode transisi yang ditandai dengan upaya untuk membangun sistem politik yang demokratis dan stabil setelah kekacauan pasca-Perang Dunia I. Namun, Republik Weimar menghadapi tantangan besar dari berbagai pihak, termasuk kelompok-kelompok ekstremis, khususnya Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Pada tahun 1933, Hitler berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan rezim Nazisme yang otoriter dan totaliter di Jerman. Rezim Nazi ini menghancurkan demokrasi dan kebebasan sipil, serta melakukan kebijakan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama Yahudi.

Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, negara tersebut dibagi menjadi dua bagian: Jerman Barat yang didukung oleh Amerika Serikat dan Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Jerman Barat mendirikan sistem politik yang demokratis, kapitalis, dan pro-Barat, sementara Jerman Timur menjadi negara komunis yang otoriter di bawah kendali Uni Soviet. Pada tahun 1990, reunifikasi Jerman terjadi dan kedua negara tersebut bersatu kembali menjadi Republik Federal Jerman. Sejak reunifikasi, Jerman telah menjadi salah satu negara paling kuat dan berpengaruh di Eropa dengan sistem politik yang sangat modern. Republik Federal Jerman adalah negara federal dengan sistem pemerintahan parlementer yang didasarkan pada konstitusi dasar (Grundgesetz) yang disahkan pada tahun 1949.

Sistem politik Jerman saat ini memiliki tiga cabang kekuasaan yang independen: eksekutif (pemerintah), legislatif (Parlemen Federal), dan yudikatif (pengadilan). Kanselir adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh Bundestag (Parlemen Federal) dan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden Federal adalah kepala negara yang memiliki peran seremonial dan mewakili Jerman dalam hubungan internasional. Jerman juga memiliki sistem multipartai yang kuat dengan partai-partai utama seperti CDU/CSU (Partai Persatuan Demokrat Kristen/Partai Persatuan Sosial Kristen), SPD (Partai Demokrat Sosial), dan Partai Hijau. Sistem pemilihan umum dilakukan secara proporsional dengan ambang batas 5% untuk masuk ke parlemen.

Selain itu, Jerman juga dikenal dengan sistem federalisme yang kuat, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian (Länder). Negara bagian memiliki otonomi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kepolisian, dan budaya. Secara keseluruhan, sistem politik Jerman saat ini sangat modern dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan perlindungan lingkungan. Jerman juga aktif dalam kerja sama internasional dan menjadi salah satu pemimpin di Uni Eropa. Dengan demikian, sistem politik Jerman saat ini mencerminkan perkembangan negara tersebut sebagai salah satu negara demokratis terkemuka di dunia.

Begitupun dengan Prancis yang memiliki sejarah panjang sama halnya seperti Jerman namun tetap terdapat banyak hal yang berbeda antara Jerman dan Prancis. Prancis sebagai salah satu kekuatan dominan di Eropa pada Abad Pertengahan dan masa Renaisans. Pada masa Renaisans, kekuasaan Prancis di Eropa merupakan salah satu faktor utama yang membentuk fondasi pembentukan negara modern Prancis. Renaisans merupakan periode penting dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan pemikiran yang revolusioner. Di tengah periode ini, Prancis muncul sebagai salah satu

kekuatan dominan di Eropa yang berperan penting dalam proses pembentukan negara modern. Salah satu aspek penting dari kekuasaan Prancis pada masa Renaisans adalah kebijakan ekspansi wilayah yang dilakukan oleh para raja Prancis. Raja-raja Prancis, terutama dari Wangsa Valois, melakukan berbagai kampanye militer untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Misalnya, Raja Charles VIII melakukan kampanye militer di Italia pada akhir abad ke-15 yang membawa Prancis masuk ke dalam urusan politik Italia. Hal ini tidak hanya memperluas wilayah Prancis, tetapi juga meningkatkan pengaruh politik dan kekuasaan Prancis di Eropa.

Selain itu, kekuasaan Prancis pada masa Renaisans juga didukung oleh perkembangan ekonomi dan perdagangan yang pesat. Prancis menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Eropa dan memiliki hubungan dagang yang kuat dengan negara-negara lain di Eropa. Kekuatan ekonomi ini memberikan dukungan finansial bagi pemerintahan Prancis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ekspansi dan pembangunan infrastruktur negara. Penting juga untuk mencatat bahwa pada masa Renaisans, Prancis mengalami perkembangan budaya dan intelektual yang signifikan. Para penguasa Prancis seperti Raja Francis I menjadi pelindung seniman, filsuf, dan ilmuwan terkemuka pada masa itu. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan pemikiran yang inovatif di Prancis. Dengan demikian, kekuasaan Prancis pada masa Renaisans tidak hanya bersifat politik dan militer, tetapi juga mencakup aspek-aspek budaya dan intelektual yang penting dalam pembentukan negara modern.

Pada awal abad ke-17, Prancis mengalami perubahan besar dalam sistem pemerintahan dengan munculnya monarki absolut yang menjadi pondasi bagi pembentukan negara modern Prancis. Monarki absolut merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada sepenuhnya di tangan raja, tanpa adanya pembatasan dari badan legislatif atau lembaga lainnya. Proses pendirian monarki absolut di Prancis dimulai sejak masa pemerintahan Raja Louis XIV, yang sering disebut sebagai Raja Matahari. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pendirian monarki absolut di Prancis adalah keinginan para raja untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan mereka. Raja Louis XIV, yang memerintah dari tahun 1643 hingga 1715, dikenal dengan kebijakan absolutisme-nya yang kuat. Ia menegaskan prinsip "L'État, c'est moi" (Negara adalah aku), yang menunjukkan keyakinannya bahwa kepentingan negara dan kepentingan pribadi raja adalah satu kesatuan. Raja Louis XIV menggunakan kekuasaannya untuk sentralisasi kekuasaan, mengurangi otonomi para bangsawan, dan mengonsolidasikan kekuasaan di tangan raja.

Selain itu, Raja Louis XIV juga membangun istana megah di Versailles sebagai simbol kekuasaan absolutnya. Istana Versailles bukan hanya menjadi tempat tinggal raja dan keluarganya, tetapi juga pusat pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik, budaya, dan sosial di Prancis. Dengan memusatkan kekuasaan di sekitar istana Versailles, Raja Louis XIV berhasil mengontrol dan mengawasi para bangsawan serta memperkuat kendali pemerintah atas seluruh wilayah Prancis. Perkembangan monarki absolut di Prancis juga didukung oleh faktor ekonomi dan militer. Raja Louis XIV melakukan reformasi fiskal dan administratif untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat militer. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh raja membantu Prancis menjadi kekuatan ekonomi yang kuat di Eropa, sementara kebijakan militernya memperluas wilayah kekuasaan Prancis di Eropa.

Monarki absolut di Prancis juga didukung oleh dukungan dari gereja dan bangsawan. Gereja Katolik Roma mendukung kebijakan absolutisme raja sebagai bagian dari konsep monarki ilahi yang melegitimasi kekuasaan raja. Para bangsawan yang mendukung kebijakan raja juga mendapatkan imbalan berupa jabatan dan kekuasaan di bawah kendali raja. Dengan demikian, pendirian monarki absolut di Prancis pada masa Raja Louis XIV menjadi pondasi bagi pembentukan negara modern Prancis. Kekuasaan absolut raja, sentralisasi pemerintahan, perkembangan ekonomi dan militer, serta dukungan dari gereja dan bangsawan membentuk struktur politik yang kokoh dan stabil untuk Prancis. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi negara modern Prancis dengan identitas politik, budaya, dan sosial yang unik.

Pada tahun 1789, Revolusi Prancis meletus dan membawa perubahan besar dalam sistem politik dan sosial Prancis yang telah berlangsung selama berabad-abad. Revolusi ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat Prancis terhadap pemerintahan absolut monarki yang dipimpin oleh Raja Louis XVI, yang pada saat itu menghadapi masalah keuangan yang serius. Rakyat Prancis, terutama dari golongan buruh dan petani yang menderita akibat ketidakadilan sosial dan pajak yang berat, mulai memberontak dan menuntut reformasi. Revolusi Prancis memiliki dampak besar terhadap sistem politik dan sosial Prancis. Salah satu perubahan utama yang terjadi adalah penghapusan monarki absolut dan pendirian Republik Prancis. Raja Louis XVI dieksekusi oleh guillotine pada tahun 1793, dan kekuasaan monarki digantikan oleh pemerintahan republik yang dijalankan oleh Konvensi Nasional. Revolusi ini juga membawa penghapusan sistem kelas yang ketat dan memberikan hak politik kepada semua warga negara Prancis, tanpa memandang status sosial atau kekayaan.

Tidak hanya itu, Revolusi Prancis juga mempengaruhi perkembangan demokrasi di Eropa. Revolusi ini menjadi inspirasi bagi gerakan revolusioner di berbagai negara Eropa, yang kemudian memicu gelombang revolusi dan perubahan politik di berbagai negara Eropa. Prinsip-prinsip revolusi seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan persamaan di hadapan hukum mulai tersebar di seluruh Eropa, mempengaruhi perkembangan sistem politik di benua tersebut. Selain itu, Revolusi Prancis juga memperkuat konsep nasionalisme Prancis. Selama revolusi, rakyat Prancis dari berbagai lapisan masyarakat bersatu untuk melawan kekuasaan monarki dan menegakkan prinsip-prinsip revolusi. Semangat persatuan dan identitas nasional Prancis semakin kuat selama periode revolusi, yang kemudian membentuk dasar bagi konsep nasionalisme Prancis yang lebih kuat di masa depan. Secara keseluruhan, Revolusi Prancis pada tahun 1789 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan sosial Prancis, mempengaruhi perkembangan demokrasi di Eropa, dan memperkuat konsep nasionalisme Prancis. Revolusi ini merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah Prancis dan Eropa, yang memberikan dorongan bagi perubahan politik dan sosial yang lebih inklusif dan demokratis.

Setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789, sistem politik Prancis mengalami perubahan yang signifikan. Revolusi tersebut mengakhiri pemerintahan monarki absolut dan memulai era Republik Prancis. Pada awalnya, kekuasaan dipegang oleh Konvensi Nasional yang kemudian digantikan oleh Direktori. Namun, pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte merebut kekuasaan dan mendirikan Kekaisaran Prancis. Setelah kejatuhan Napoleon pada tahun 1815, Prancis kembali menjadi monarki konstitusional dengan Restorasi Bourbon. Namun, pada tahun 1830, Revolusi Juli menggulingkan monarki

Bourbon dan memulai pemerintahan Louis-Philippe, yang merupakan monarki konstitusional.

Pada tahun 1848, Revolusi Februari menggulingkan Louis-Philippe dan mendirikan Republik Kedua. Namun, pada tahun 1852, Louis-Napoleon Bonaparte (Napoleon III) memulai Kekaisaran Kedua. Kekaisaran tersebut berakhir setelah kekalahan Prancis dalam Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870. Setelah itu, Prancis kembali menjadi republik dengan pendirian Republik Ketiga. Namun, sistem politik Prancis terus berkembang dengan berbagai perubahan pemerintahan dan konstitusi. Pada abad ke-20, Prancis mengalami periode yang sulit seperti Perang Dunia I dan II, serta periode pasca-perang yang penuh tantangan.

Saat ini, sistem politik Prancis adalah republik semi-presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Prancis memiliki sistem multipartai yang kuat dengan partai-partai utama seperti Partai Sosialis, Partai Republik, dan partai-partai lainnya yang memainkan peran penting dalam politik Prancis.

KESIMPULAN

Jerman dan Prancis adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang dan berpengaruh di Eropa. Meskipun keduanya terletak di benua yang sama, mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam bentuk negara, sistem negara, struktur negara, dan sejarah awal negara. Pertama-tama, perbedaan dalam bentuk negara antara Jerman dan Prancis dapat dilihat dari sejarah pembentukan negara mereka. Jerman adalah negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian yang memiliki otonomi relatif dalam hal kebijakan internal. Sementara itu, Prancis adalah negara unitaris yang pusat kekuasaannya terpusat di pemerintah pusat di Paris. Perbedaan ini mencerminkan tradisi politik dan sejarah masing-masing negara, di mana Jerman dibentuk oleh serangkaian negara-negara kecil yang bersatu menjadi satu kesatuan, sementara Prancis memiliki sejarah sentralisasi kekuasaan yang kuat.

Kedua, sistem negara di Jerman dan Prancis juga berbeda. Jerman memiliki sistem parlementer dengan kanselir sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Di sisi lain, Prancis memiliki sistem semi-presidensial di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara perdana menteri memimpin pemerintahan sehari-hari. Ketiga, struktur negara Jerman dan Prancis juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jerman memiliki sistem politik yang lebih terdesentralisasi dengan kekuasaan yang dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Di sisi lain, Prancis memiliki struktur yang lebih terpusat dengan kekuasaan politik yang terkonsentrasi di pemerintah pusat. Terakhir, sejarah awal negara Jerman dan Prancis juga memberikan gambaran tentang bagaimana kedua negara tersebut berkembang menjadi negara modern yang kita kenal saat ini. Jerman memiliki sejarah yang kompleks dengan pembentukan sebagai negara bersatu pada abad ke-19 setelah periode fragmentasi politik yang panjang. Sementara itu, Prancis memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kekuatan politik dan budaya terbesar di Eropa dengan pengaruhnya yang mendunia.

Perbedaan dalam bentuk negara, sistem negara, struktur negara, dan sejarah awal antara Jerman dan Prancis mencerminkan keragaman politik dan budaya di Eropa. Meskipun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, baik Jerman maupun Prancis memiliki peran penting dalam sejarah Eropa dan merupakan aktor utama dalam politik global saat ini. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan keberagaman dalam konstruksi negara dan sistem politik di seluruh dunia.

DAFTAR REFERENSI

- Alternative, A., & Health, W. (2022). Global Health Watch 6. Global Health Watch 6. <https://doi.org/10.5040/9781350320840>
- Cole, A. (2014). Not saying, not doing: Convergences, contingencies and causal mechanisms of state reform and decentralisation in Hollande's France. *French Politics*, 12(2), 104–135. <https://doi.org/10.1057/fp.2014.7>
- Green, S. (2013). The Politics of the New Germany. *The Politics of the New Germany*. <https://doi.org/10.4324/9780203626627>
- Hampson, N. (2005). Review: The Oxford History of the French Revolution. *The English Historical Review*, 120(485), 240–241. <https://doi.org/10.1093/ehr/cei090>
- IMPERIAL GERMANY , 1871 – 1918. (1918).
- McMurdie, J. (2014). The Thirty Years ' War : Examining the Origins and Effects of Corpus Christianum ' s Defining Conflict. <https://doi.org/10.1017/9781107300000>
- pdf-eiu-democracy-index-2020_compress.pdf. (n.d.).
- Politics Textbook Catalogue Spring 2024 Welcome to the Politics Textbook Catalogue Spring 2024. (2024).
- Silverman, M. (2007). The French Republic unveiled. In *Ethnic and Racial Studies* (Vol. 30, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/01419870701356056>
- Villar, O. (2021). From the War on farc to the War on Dissidents: a Critique of Imperial Peace in a Post-Agreement Theatre of War. *Journal of Labor and Society*, 24(2), 282–303. <https://doi.org/10.1163/24714607-bja10017>